MEMBELANJAKAN DANA DIP LANSUNG KE PENERBIT (SWAKELOLA) : SUATU PENGALAMAN PERPUSTAKAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Oleh:

Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.[1]; Ir. Janti G. Sujana, MA[2]; Ir. Yuyu Yulia, SIP., M.Si.[3]

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bersama koleksi bagi perpustakaan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan layanan suatu perpustakaan. Untuk memupuk koleksi yang baik dan dalam jumlah yang cukup dipengaruhi oleh hal-hal seperti: jumlah atau besarnya anggaran, sistem seleksi, cara pengadaan dan lain-lain. Bagi perpustakaan perguruan tinggi negeri selama ini cara pengadaannya selalu mengikuti aturan yang diberlakukan kepada proyek pengadaan barang yaitu Keppres nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Menurut keppres tersebut pengadaan barang dilakukan melalui empat macam cara yaitu (a) pelelangan, (b) pemilihan langsung, (c) penunjukan langsung dan (d) swakelola. Selama ini pengadaan buku dan jurnal perpustakaan dilakukan dengan cara pelelangan yang biasanya melibatkan sekurang-kurangnya 10 perusahaan (lokal) dengan kategori ekonomi lemah (tergantung besar anggarannya). Dengan cara seperti ini, maka anggaran untuk pembelian buku (dan/atau jurnal) bagi perguruan tinggi tidak dapat mencapai efisiensi 100 % karena harus juga dikeluarkan untuk biaya lelang dan biaya-biaya lain yang sesungguhnya tidak terkait dengan harga buku dan/atau jurnal.

Dengan iktikad untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (pembelian buku dan/atau jurnal) yang jumlahnya tidak terlalu besar, Perpustakaan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba untuk membelanjakan sendiri anggaran pengadaannya yang diperoleh dari sumber DIP (Daftar Isian Proyek) langsung ke penerbit. Tentu saja terlebih dahulu mempelajari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak disalahkan ketika diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, BPKP maupun BPK.

Pengadaan buku dan/atau jurnal dengan cara membeli langsung ke penerbit dengan sumber dana DIP ini telah dilakukan pada tahun anggaran 2002. Sengaja pengalaman ini ditulis agar informasi ini dapat diketahui bersama dan apabila pengalaman Perpustakaan IPB ini dipandang baik, mungkin dapat dijadikan contoh untuk dapat dilaksanakan di perpustakaan-perpustakaan lainnya.

LANDASAN HUKUM YANG DIGUNAKAN

Pengadaan buku dengan cara membeli langsung kepada penerbit ini didasari oleh Keppres nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Pasal yang digunakan adalah pasal 12 ayat 2 c butir (iv) yaitu penyedia barang/jasa tunggal. Logikanya adalah bahwa penerbit merupakan penyedia tunggal barang berupa buku. Jika buku dengan judul A dan dikarang oleh pengarang B diterbitkan oleh penerbit C, maka penerbit lain tidak mungkin menerbitkan buku yang sama. Jika hal ini terjadi maka penerbit lain (yang menerbitkan buku sama tadi) tersebut melanggar undang-undang hak Cipta dan akan menjadi sengketa pidana. Oleh karena itu maka penerbit C merupakan penyedia tunggal untuk buku dengan judul A dan pengarang B tersebut. Dengan demikian maka pengadaan buku tersebut dapat ditentukan langsung oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan dengan menunjuk penerbit C sebagai penyedia barang.

Selain Keppres tersebut di atas, kita masih dapat menggunakan peraturan lainnya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah RI nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Pasal 1 butir 4 PP tersebut menyatakan bahwa barang kena pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

Selain dua peraturan tersebut di atas masih ada satu peraturan lagi yang dapat dijadikan landasan hukum untuk pembebasan pajak yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 417/PJ/2001 tentang Petunjuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporannya. Pasal 4 butir (1) bagian b menyatakan bahwa Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai adalah buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

MEKANISME

Sebelum pengadaan ini dilakukan secara swakelola pertama kali Kepala Perpustakaan menulis surat kepada rektor yang intinya meminta ijin agar pengadaan buku dan/atau jurnal dapat dilakukan secara langsung ke penerbit. Dasarnya dari permohonan tersebut adalah buku dan/atau jurnal adalah produk spesifik dari suatu penyedia barang/jasa (dalam hal ini penerbit). Artinya buku yang diterbitkan oleh Penerbit Gramedia, misalnya, tidak akan bisa diperoleh di Penerbit Gunung Agung. Begitu pula sebaliknya. Untuk produk-produk seperti ini sistem pengadaannya tidak bisa dilelang melainkan dengan melalui penunjukan lansung. Oleh karena itu pembeliannyapun harus langsung ke penerbitnya, tidak boleh melalui toko buku atau agen. Bila pembelian dilakukan pada toko buku atau agen, maka menyalahi aturan karena toko buku atau agen yang lainpun bisa menjual barang yang sama, jadi tidak spesifik lagi. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Perpustakaan IPB untuk dapat membelanjakan dana DIPnya. Sesudah mendapatkan surat persetujuan dari Rektor, maka Perpustakaan mulai menyurati penerbit untuk menyatakan akan membeli buku dan/atau melanggan jurnal yang diterbitkan oleh penerbit tersebut dan meminta penerbit tersebut untuk mengirimkan tagihan atau *proforma invoice*. Berdasarkan *proforma invoice* ini perpustakaan meminta uang muka ke proyek P2T. Dan berdasarkan *proforma invoice* ini pula Perpustakaan membelanjakan uang muka tadi melalui bank dengan cara mengirimkan *bank draft* ke penerbit. Selanjutnya Perpustakaan tinggal menunggu buku dan/atau jurnal dikirim. Sementara itu Perpustakaan mempertanggung jawabkan uang yang telah dibelanjakan tersebut ke proyek. Bukti pembelanjaannya adalah *proforma invoice* dan kuitansi dan aplikasi pembelian *bank draft*. Jika sisa dana di proyek masih ada, maka Perpustakaan dapat mengajukan uang muka lagi setelah pertanggung jawabannya diterima oleh proyek.

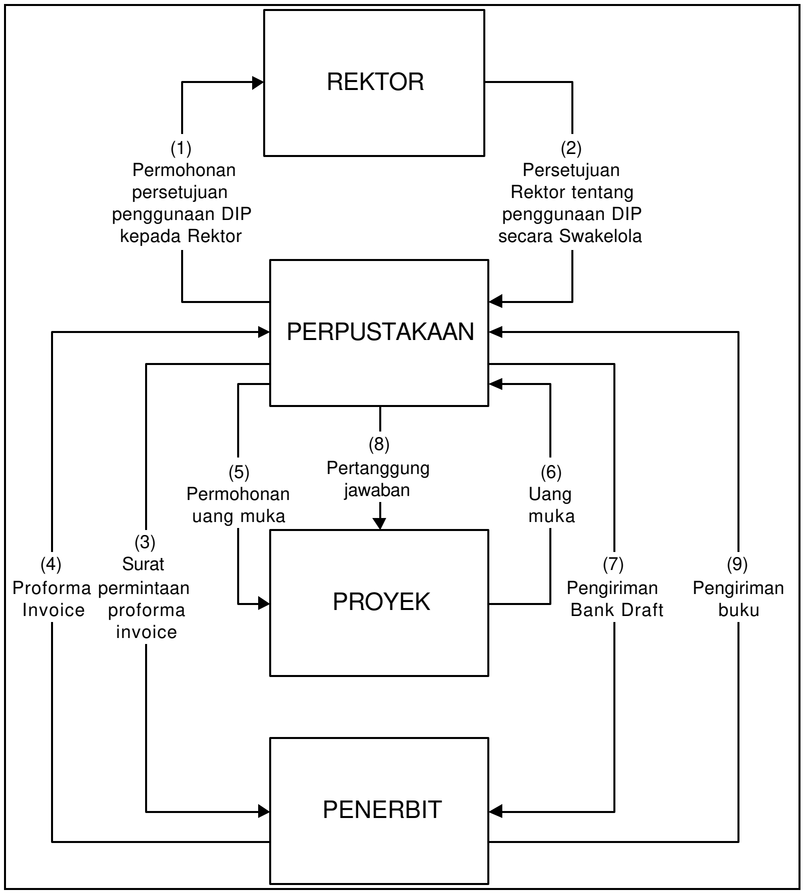

Gambar 1. Mekanisme Pengadaan Buku dan/atau Jurnal Ilmiah dari Dana DIP dengan cara pembelian langsung ke penerbit

KEUNTUNGAN

Keuntungan pengadaan seperti ini adalah perpustakaan dapat memanfaatkan dana DIP 100 % untuk keperluan pembelian buku dan/atau jurnal. Dalam pengadaan ini tidak ada biaya-biaya tambahan yang tidak menyangkut pembelian buku seperti administrasi, pajak, keuntungan perusahaan, dan sebagainya. Selain itu pengadaan seperti ini dapat dilakukan di awal tahun, segera setelah dana DIP tersedia. Dengan demikian perpustakaan bisa mendapatkan buku dan/atau jurnal lebih mutakhir dengan jumlah yang lebih banyak. Buku yang diseleksi dari katalog penerbit oleh dosen bisa dijamin dapat dibeli oleh Perpustakaan. Tidak seperti pada pengadaan dengan sistem lelang dimana buku yang sudah dipilih bisa saja tidak tersedia di pasaran (*out of market*) pada waktu pengadaan dilaksanakan. Hal ini karena pada sistem lelang proses administrasinya sering sangat panjang sehingga jarak antara seleksi buku dan pelaksanaan pengadaan bisa lebih dari enam bulan. Pada pengadaan dengan cara lelang, buku yang tidak dapat dibeli karena persediaannya telah habis di pasaran, tidak dapat diganti begitu saja. Penggantian buku yang tidak dapat dibeli tersebut harus melalui proses yang disebut dengan adendum. Dan ini sering memakan waktu yang sangat lama. Seringkali buku-buku tersebut akhirnya tidak dapat diganti dan akibatnya anggaran tidak dapat diserap 100 %. Pada beberapa perpustakaan seringkali pihak proyek atau rekanan mengganti buku yang tidak dapat dibeli tersebut tanpa persetujuan perpustakaan. Ini untuk mengejar waktu proses adendum tadi. Akibatnya, walaupun anggaran dapat diserap 100 % namun buku yang diperoleh pihak perpustakaan tidak sesuai dengan permintaan perpustakaan (yang diseleksi oleh dosen). Hal ini menyebabkan kekecewaan bagi perpustakaan dan khususnya bagi dosen yang sudah menyeleksi buku tersebut. Dengan pembelian langsung ke penerbit atau swakelola perubahan judul biasanya sangat mudah. Bila ada buku yang dipesan sudah *out of print*, perpustakaan tinggal membuat surat kepada rektor meminta ijin untuk mengganti judul tersebut dengan yang lebih mutakhir. Proses ini biasanya sangat singkat.

Satu keuntungan lain yang bersifat psikologis adalah tidak adanya rasa tidak senang karena Perpustakaan tidak perlu melakukan negosiasi (tarik ulur) dengan rekanan soal harga buku/jurnal yang diajukan dalam daftar. Pihak rekanan biasanya ingin menambahkan harga setinggi-tingginya karena takut mengalami kerugian, sedangkan pihak perpustakaan ingin memperoleh sebanyak mungkin buku/jurnal yang bisa dibeli/dilanggan. Seringkali perpustakaan banyak mengeluh soal penambahan harga buku/jurnal tersebut.

HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN

Pengadaan dengan cara membeli langsung ke penerbit ini tentunya sangat melelahkan dan memerlukan persiapan yang matang. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengadaan dapat berjalan dengan lancar antara lain adalah:

1. SDM yang cukup dan punya kemampuan Bahasa Inggris. Hal ini karena Perpustakaan banyak membeli buku berbahasa asing sehingga perpustakaan harus melakukan koresponden dengan penerbit luar negeri yang tentunya dilakukan dalam Bahasa Inggris.
2. Sistem administrasi yang baik sangat diperlukan karena proses pengadaan biasanya harus berjalan cepat. *Proforma invoice* biasanya hanya berumur satu sampai tiga bulan saja. Jika proses pengadaan berjalan lambat, maka kita akan menghadapi *proforma invoice* yang habis masa berlakunya dan harus diulang prosesnya. Pertanggung jawaban keuangan kepada proyek juga berjalan cepat. Biasanya kita diberikan waktu satu bulan sejak pengambilan uang muka sampai kepada pertanggung jawaban uang muka.
3. Dana pendamping untuk biaya-biaya yang tidak dapat dimasukkan dalam pengeluaran dari dana DIP seperti transport lokal staf, administrasi pos dan lain-lain.

Harus diingat bahwa proses pengadaan dengan cara pembelian langsung ke penerbit adalah proses yang sangat melelahkan. Hanya idealisme yang kuat saja yang dapat dijadikan modal dasar pustakawan bidang pengadaan untuk menyukseskan proses pengadaan dengan cara ini. Dengan cara ini sebetulnya sangat sedikit, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada, celah untuk melakukan manipulasi penyerapan dana, khususnya jika pengadaan buku dilakukan ke penerbit luar negeri.

PENUTUP

Selama ini perpustakaan selalu mendambakan cara pengadaan koleksi buku dan/atau jurnal yang bebas dari birokrasi pemerintahan. Karena dengan cara pengadaan koleksi seperti ini perpustakaan dapat menyediakan bahan pustaka mutakhir. Idealnya begitu suatu judul buku diluncurkan saat itu juga (atau minimal besoknya) buku tersebut sudah ada di perpustakaan. Jika perpustakaan bisa menyediakan informasi yang mutakhir seperti ini, niscaya perpustakaan akan selalu didatangi oleh pelanggannya.

Pengalaman Perpustakaan IPB pada tahun anggaran 2002 setidak-tidaknya mulai mengarah kepada idealisme tersebut. Buku bisa lebih cepat dibeli dan bisa lebih cepat disediakan kepada pemakai tanpa menunggu proses lelang yang biasanya memakan waktu sangat lama. Selain itu Perpustakaan IPB sudah bisa meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Saat ini (tahun 2003) Perpustakaan IPB telah memasuki tahun kedua dalam proses pengadaan buku secara langsung ke penerbit. Pengalaman ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi perpustakaan lain untuk membelajakan dana DIPnya dengan cara yang bahkan lebih mudah dan baik lagi.

---

[1] Kepala Perpustakaan, Institut Pertanian Bogor dan saat ini sebagai Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia periode 2000 - 2003.
[2] Wakil Kepala, Perpustakaan Institut Pertanian Bogor
[3] Kepala Bidang Pembinaan Koleksi, Perpustakaan Institut Pertanian Bogor